

PARIWISATA DALAM MASYARAKAT KAPITALIS: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

by Dewa Putu Oka Prasiasa

Submission date: 18-Mar-2020 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1277340797

File name: 19-Sains_9_1_-2011.doc (89.5K)

Word count: 2936

Character count: 20862

PARIWISATA DALAM MASYARAKAT KAPITALIS: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

Dewa Putu Oka Prasiasa

Abstrak

Kajian pariwisata dalam masyarakat kapitalis menurut perspektif kajian budaya (*cultural studies*) lebih ditekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, terutama dari segi bagaimana pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan sebaliknya. Pola-pola pariwisata dan proses-prosesnya merupakan jawaban atas nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Dari hasil analisis dapat dikemukakan bahwa (1) pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), yang berwujud dominasi sebagai pelaksanaan dari kekuasaan; (2) pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruhi oleh ruang dan waktu; (3) kajian politik pariwisata telah menampilkan *the three player* atau *the three actor* dengan komponennya yaitu negara (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pasar (*market*). Komponen yang paling baru dimasukkan sebagai pemain dan aktor politik pariwisata dan sekaligus merupakan pengaruh sosiologi adalah pasar (*market*); (4) kapitalisasi dan komodifikasi muncul sebagai akibat globalisasi pasar pariwisata atau sebagai buah dari internasionalisasi pariwisata; (5) penempatan pariwisata dalam ruang kapitalis sebagai konsekuensi dari politik pariwisata akan berbicara tentang “siapa memperoleh apa”, “dimana diperoleh”, dan “bagaimana memperoleh”; dan (6) dalam mempelajari politik pariwisata perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik, baik secara eksplisit maupun implisit.

Kata Kunci: masyarakat kapitalis, kajian budaya, dominasi, kapitalisasi, komodifikasi.

Pendahuluan

Kajian pariwisata dalam masyarakat kapitalis lebih ditekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, terutama dari segi bagaimana pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan sebaliknya. Pola-pola pariwisata dan proses-prosesnya merupakan jawaban atas nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Meskipun perkembangan pariwisata menarik dari sisi ilmu sosial, namun sebagian penelitian pariwisata hanya

terfokus untuk mengkaji pariwisata dari sisi ekonomi dan pasar (*market*) saja, dengan peran utama berupa kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata (William et.al., 1991:1).

Dari fokus penelitian pariwisata yang hanya berpusat pada sisi ekonomi dan *market* tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang dipergunakan cenderung merupakan pendekatan ekonomi yang sempit, bersifat fungsionalisasi dan de-kontekstualisasi (Roche, 1992). Contohnya, ketika penelitian dapat mempertimbangkan dampak ekonomi kotor maupun bersih dalam permintaan dan penawaran produk pariwisata, permasalahan mengenai pemerataan tenaga kerja yang ada dan pendapatan serta waktu luang di Daerah Tujuan Wisata dan daerah-daerah lainnya yang sedang berkembang tidak banyak dibicarakan. Ini berarti permasalahan tentang “siapa mendapatkan apa”, “dimana”, “mengapa”, dan “bagaimana” tetap tidak akan terpecahkan. Semua bentuk pengembangan pariwisata melibatkan dominasi atas serangkaian nilai-nilai di atas sejumlah nilai-nilai alternatif melalui pelaksanaan kekuasaan. Craik (1991:321) berpendapat bahwa hubungan antara tuan rumah dan pengunjung dalam pariwisata hanya dapat dimengerti dalam konteks hubungan internasional antara ¹² negara-negara berkembang dan negara-negara barat yang makmur. Dengan demikian, kebijakan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat pariwisata itu berlangsung.

Menurut Simmons dan Dvorin (1977) dalam Hall (1994:138) menyatakan bahwa analisis kebijakan khusus mengenai lingkungan akan berkisar tentang pengidentifikasian komponen-komponen keadaan dan ciri-ciri dinamis dari suatu lingkungan, khususnya lingkungan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Lebih lanjut Majone (1989) dalam

Hall (1994:138) menyatakan bahwa suatu masalah sederhana tidak dapat dipecahkan dengan hanya menawarkan solusi teoritis yang tidak mempertimbangkan batasan-batasan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, akan sangat keliru bila mempergunakan standar ideal dalam menilai alat-alat kebijakan, karena standar tersebut harus berkaitan dengan lingkungan khusus tempat alat-alat kebijakan tersebut digunakan. Dengan demikian, lingkungan tempat kebijakan umum dibuat harus mencakup nilai-nilai, norma-norma, pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi serta pertimbangan-pertimbangan teknis yang sesuai dengan kriteria dalam memilih kebijakan yang akan dijalankan sehingga ada kejelasan dalam operasionalisasinya.

Britton (1991) menempatkan kritik sosial pada pariwisata dalam kerangka masyarakat kapitalis, di samping itu Urry (1990:23) menyatakan bahwa konsumsi jasa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial yang terkait di dalamnya. Oleh karenanya, pertimbangan faktor politik dalam aktivitas kepariwisataan terutama dalam pemanfaatan waktu senggang (*leisure time*) bukan semata-mata hasil dari kekuasaan ekonomi dan sosial, melainkan juga sebagai hasil dari perjuangan politik.

Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika kapitalis mengalami perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga mengalami perubahan bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Dengan demikian berarti bahwa memahami pariwisata tidak dapat terlepas dari pemahaman tentang kapitalis. Roche (1992) menyebutkan pariwisata massal (*mass tourism*) merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan industri kapitalis modern dan fenomena sosio-kultural. Industri kapitalisme bangsa barat telah mengalami perubahan struktur yang sangat tajam sekitar tahun 1980-an dengan adanya pergeseran-pergeseran

dari regional, nasional dan internasional dalam kesempatan meningkatkan modal dan kesempatan kerja. Dalam pergeseran tersebut, pariwisata merupakan suatu komponen yang penting dan dianggap sebagai “postindustrialisme” atau “postfordisme”.

Pariwisata adalah bagian dari globalisasi ekonomi internasional, mandiri dan berjejaring luas dengan ketergantungan yang semakin berkurang terhadap negara sebagai satuan organisasi ekonomi internasional. Dengan adanya perubahan ekonomi yang sangat dramatis itu berpengaruh pada budaya yang mengarah pada perpecahan (fragmentasi), citra, bentuk pertunjukan, kekuasaan pasar dan pandangan wisatawan berpengaruh besar terhadap pengalaman wisatawan dalam berwisata (Urry, 1990).

Waktu senggang (*leisure time*) tidak hanya sekedar waktu bebas dari pekerjaan rutin, tetapi sudah merupakan suatu komoditi. Dalam masyarakat kapitalis, waktu senggang masyarakat dibentuk secara langsung dengan apa yang ditawarkan oleh “industri budaya”. Dalam kondisi seperti ini, negara melihat sebagai upaya penyesuaian dan pemberian dukungan kepada industri budaya agar masyarakat merasakan kesan dari tindakan-tindakan politiknya (Wilson, 1990). Ideologi yang dibentuk adalah hanya akan melegitimasi hubungan antara industri kebudayaan dengan ideologi yang dominan. Pada akhirnya, ideologi semacam ini membantu mengabadikan bahwa bersenang-senang dan dihibur benar-benar merupakan kemurahan hati dari akibat-akibat politiknya (Wilson, 1990:51).

Dalam *the three player* atau *the three actor* industri pariwisata, akan tampil negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan pasar (*market*). Berbicara masalah pasar berarti juga berbicara konsumen dalam hal ini wisatawan. Dalam konteks politik pariwisata, ideologi mengenai “kekuasaan konsumen” juga mendorong serta menghargai

atas pilihan *leisure time* sebagai kebebasan perseorangan. Dalam kaitan pemahaman politik yang dikaitkan dengan adanya dominasi dan pengawasan, seharusnya politik pariwisata dijauhkan dari modal yang terkait dengan *leisure time*. Seharusnya pula para birokrat mengarahkan pada pemanfaatan *leisure time* pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik.

Selain *leisure time*, salah satu aspek penting yang terjadi sekarang ini adalah dijadikannya berbagai tempat sebagai komoditi pariwisata yang berupa daya tarik wisata. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pemikiran tentang globalisasi pasar pariwisata sebagai akibat kapitalisasi dan komodifikasi. Sistem produksi pariwisata secara bersama-sama “menjual” tempat-tempat untuk menarik wisatawan, sarana-sarana pariwisata dibuat untuk melengkapi promosi penjualan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan. Ini berarti bahwa suatu tempat dibuat menjadi sebuah komoditi dan dirubah menjadi suatu pengalaman dan citra untuk dinikmati dan dikonsumsi oleh wisatawan.

Pembuatan tempat peristirahatan (*stop over*) pada lokasi tertentu pada jalur wisata yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain dapat mengkonsolidasikan hubungan produksi yang ada. Perbedaan itu akan mencerminkan hierarki dari lingkup liburan dan kelas-kelas sosial. Menurut Clarke (1981:54) perbedaan kelas dapat digolongkan secara tidak sejajar satu dengan lainnya, dalam hal produksi, kekayaan dan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya dalam hal dominasi dan sub-ordinasi. Oleh karenanya, dalam politik pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek yang mencakup lingkungan publik, tetapi juga lingkungan yang berada di luar lingkungan publik. Jika kondisi ini terjadi, akan dapat mengabaikan

dampak yang lebih luas dari proses restrukturisasi dan akumulasi teritorial dalam kapitalis gaya baru.

Salah satu indikasi dari sisi demografi yang terkait dengan perkembangan pariwisata adalah timbulnya kawasan urbanisasi di sekitar daya tarik wisata. Kawasan urbanisasi memposisikan dirinya sebagai pusat konsumsi dalam sistem kapitalis yang terus mendunia. Penciptaan ciri khas dengan memanfaatkan modal budaya menjadi dasar untuk menciptakan atau menghidupkan kembali tonggak investasi regional dan internasional. Atas dasar penciptaan yang memiliki ciri khas tersebut, maka produk pariwisata dapat dijadikan elemen penting dalam rangka politik pariwisata. Karena politik itu tidak jauh dari kekuasaan, “siapa memperoleh apa”, “dimana”, “bagaimana” dan “mengapa”, maka sudah tepat jika pariwisata diidentikkan dengan masyarakat kapitalis.

Pemahaman Politik Pariwisata

Penelitian yang berdimensi politik pariwisata cenderung bersifat insidental dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau lingkungan sebagai fokusnya. Bahkan jika dikaitkan dengan kebijakan pariwisata, seharusnya penelitian dengan dimensi politik pariwisata lebih mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan, dan bukan apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian pariwisata hubungan antara politik dan pariwisata dapat terjadi pada level internasional, nasional, regional, lokal dan pada tingkatan perorangan. Tiap-tiap tingkatan tersebut akan menggambarkan kedinamisan struktur dan kedinamisan analisis dari penelitian tersebut. Jika dalam analisis tersebut dimasukkan sistem kapitalisme yang tengah berlangsung,

maka penelitian pariwisata akan dapat menggambarkan makna sosial dan materialitas ruang dan tempat yang diciptakan pada praktek pariwisata itu sendiri. Penggambaran tersebut menurut Britton (1991:478) dapat dimasukkan dalam “proses akumulasi”. Jika dikaitkan dengan fenomena pariwisata khususnya waktu senggang (*leisure time*), maka fenomena tersebut terkait dengan perjuangan untuk mengontrol waktu dan ruang yang melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, suatu upaya dari kelompok dominan untuk mencari legitimasi melalui Undang-Undang Kepariwisata yang ada, sedangkan pada sisi lain ada kelompok-kelompok yang menolak Undang-Undang Kepariwisata tersebut dengan berbagai alasannya.

Untuk mengungkap “proses akumulasi” yang berupa susunan hubungan antara masyarakat dan tempat dalam pariwisata, membutuhkan suatu teori yang secara lugas mengetahui dan mengungkap pariwisata sebagai aktivitas kapitalis yang terorganisasi oleh sistem dinamika sosial tersebut, dengan menghubungkan produksi, sosial dan ideologinya. Sebuah analisis tentang bagaimana sistem produksi pariwisata memasarkan dan mengemas masyarakat, merupakan suatu pelajaran dalam ekonomi politik dan susunan realitas sosial dan tempat struktur sosial, baik dari sudut pandang pengunjung dan masyarakat yang menjadi tuan rumah, modal pariwisata dan industri kebudayaan, atau negara dengan berbagai macam sistem yang terkait di dalamnya.

Penelitian-penelitian mengenai pariwisata juga berkisar tentang pertentangan ideologi dan nilai-nilai. Sebagian besar penelitian pariwisata khususnya yang terkait dengan analisa kebijakan terjebak pada praduga yang bernuansa intelektual mengenai pengambilan keputusan, yang lebih menekankan pada “mengetahui bahwa” dan bukannya “mengetahui bagaimana” serta terabaikannya aspek-aspek seni dalam analisa

kebijakan. Hampir semua penelitian pariwisata menganggap pokok permasalahannya sebagai pendekatan yang bebas nilai (*value free*).

Pariwisata merupakan elemen utama dari beberapa masalah utama di bidang ekonomi pada era politik sekarang ini. Contohnya adalah internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi (Britton, 1991). Pemahaman ekonomi secara politik kritis dengan beberapa pengecualiannya (penelitian Urry, 1990a) hampir selalu terabaikan. Sebagai contoh dalam membahas politik pariwisata berkelanjutan, fokus utamanya cenderung pada masalah ekologi dan proses-proses ekonomi, sedangkan kerangka kerja politik dan budaya tidak mendapat perhatian.

Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, maka para peneliti politik pariwisata cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk menyerang masalah-masalah kebijakan.

Dalam penelitian politik pariwisata juga diadopsi pendekatan dialektikal, dengan titik tolaknya adalah pandangan-pandangan yang ada pada masyarakat. Kesimpulannya adalah, bukan bukti-bukti formal, melainkan saling pengertian dari masalah-masalah yang dibahas. Namun demikian, beberapa penelitian pariwisata gagal menjelaskan pariwisata sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Politik pariwisata yang bertujuan menganalisa kebijakan biasanya dimulai dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsip yang mutlak dan fakta-fakta yang kaku. Analisa

kebijakan bukannya menghasilkan bukti-bukti formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan. Analisa kebijakan membantu pertimbangan-pertimbangan umum melalui kritik, nasihat dan pendidikan. Analisa kebijakan juga memberikan standar argumentasi dan struktur ilmiah bagi wacana publik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyusunan kebijakan serta interaksi elemen-elemen dalam lingkungan kebijakan adalah mutlak diketahui jika ada kemauan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pariwisata, pengembangan pariwisata dan manajemen sumber daya pariwisata.

Politik Pariwisata: *Cultural Studies* Sebagai Pisau Bedah

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan (*growth*) dengan mengandalkan modal dari kaum kapitalis dan apalagi menempatkan pariwisata dalam konteks kapitalisme akan banyak berhadapan pada apa yang dinamakan dominasi, yang dalam hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat tempat pariwisata itu dikembangkan atau juga pada daerah tempat pengembangan pariwisata itu dilaksanakan. Adapun sumber dominasi yang melanda masyarakat dan daerah tersebut dapat berasal dari [1] pemerintah melalui kebijakan yang dihasilkan yang terkait dengan pariwisata, dan [2] dari kapitalis melalui modal yang ditanamkan dengan tujuan mengeruk sebanyak mungkin sumber daya alam dan potensi sumber daya budaya yang ada di daerah itu. Akibatnya, masyarakat yang merupakan salah satu representasi dari *civil society* akan didesak oleh dua kekuatan politik yaitu negara (*state*) dengan kebijakannya dan kepentingan-kepentingan pasar (*market*) yang dibawa oleh kapitalis. Jika kondisi ini tidak diatasi, masyarakat dan pariwisata akan tergerus oleh dinamika politik yang berkembang. Menurut Kitab Skanda Purana XVII.1 (Vettam Mani, 1989) dalam Titib

(2006:138) menyebutkan bahwa ⁵ pusat-pusat pertenggaran yang menghancurkan kehidupan manusia, yaitu pada kekuasaan (politik), minuman keras, perjudian, pelacuran, dan harta benda serta kekayaan.

Untuk mencegah kehancuran pariwisata sebagai akibat tekanan politik dari *state* dan *market* itu, maka penelitian-penelitian akademis yang berperspektif politik dari pariwisata sangat diperlukan terutama bagaimana mengatasi dominasi *state* dalam pembuatan kebijakan pariwisata. Selain itu Agger (2005:362-363) menyebutkan bahwa kerja akademik yang berperspektif tertentu akan dapat menunjukkan bagaimana dominasi beroperasi dan bagaimana dominasi dapat dilawan dan diatasi dari hidup sehari-hari manusia maupun dari atas, oleh politisi dan pembuat kebijakan. Jika penyebabnya sudah diketahui, dengan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada, niscaya kehancuran pariwisata akibat politik akan teratasi, tentunya didukung oleh hasil-hasil penelitian yang *applicable* guna mengeleminir kekhawatiran Matthew et.al (1991:122) tentang minimnya penelitian-penelitian yang mengangkat kepentingan-kepentingan dibalik pengembangan pariwisata.

Dalam konteks situasi *postmodern*, Bauman (1992:196) dalam Ritzer (2005:277) menyatakan bahwa ¹ secara eksistensial dalam situasi *postmodern* kekuasaan dari negara-bangsa terkikis. Bukannya terjadi pemusatan negara, kekuasaan malah menyerah pada agen-agen lokal dan parsial yang menangani serangkaian kebijakan-kebijakan lokal dan parsial. Dalam aplikasinya di lapangan, memang beberapa urusan yang terkait dengan perkembangan dan operasionalisasi pariwisata sudah diserahkan oleh negara kepada para agen-agensya, namun agen-agen tersebut bertindak sebagai kapitalis, sehingga apa yang diharapkan oleh kondisi *postmodern* yang melanda pariwisata tidak tercapai karena

kelihatan diserahkan kepada agen, namun agen tersebut masih diatur oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara (*state*) itu sendiri. Jika ada perlawanan dari masyarakat dari daerah tempat pariwisata itu dikembangkan akibat kebijakan yang dinilai oleh masyarakat merugikan, negara akan mempergunakan salah satu bentuk dari politik *postmodern* yaitu politik kepastian (*politics of certainty*). Menurut Ritzer (2005:278) dalam politik kepastian ¹ selalu mencari penegasan fakta bahwa mereka telah membuat pilihan-pilihan yang tepat. Oleh karena itu negara tidak akan mau dilawan begitu saja dari kebijakan pariwisata yang gulirkan, karena mereka sudah menganggap tepat pilihan dari kebijakan tersebut.

Menurut Meethan (2001) dalam Smith dan Robinson (2006:8), dalam kondisi politik kepastian yang dibuat oleh *state* melalui kebijakan pariwisatanya, masyarakat sebagai bagian dari *civil society* tidak akan begitu saja menerima pariwisata, mereka akan melakukan kontestasi dan resistensi. Dengan demikian *state* harus siap membuat beberapa alternatif kebijakan untuk satu masalah pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dikontestasi oleh pengambil kebijakan dalam suatu masyarakat yang lebih luas, dengan harapan masyarakat mau mengkaji dengan berbagai pertimbangannya sebelum menentukan pilihan. Dalam kondisi ini, masyarakat akan diperkaya dengan pengalaman demokrasi dalam menentukan pilihan alternatif kebijakan pariwisata. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak ada yang berkenan dengan kebutuhan masyarakat, maka resistensi akan timbul.

Dari berbagai hal yang terkait dengan politik pariwisata (mulai dari kekuasaan, dominasi, politik kepastian yang dijalankan pemerintah, kontestasi, resistensi seperti di uraikan di atas), dan secara khusus dari 226 (*Bali Tourism Statistics 2005:66*) tempat-

tempat yang menarik untuk dikunjungi dalam berwisata (*places of interest*) di Bali, ternyata sebagian besar ada di pedesaan. Oleh karena itu menurut Ari Dwipayana dalam Putra (2004:xvii), pengertian politik yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Bali yang banyak memiliki *places of interest* di desa-desa adalah dengan mengartikan politik dari perspektif pengertian yang luas, artinya *desa adat* di Bali tidak ada jalan lain kecuali memasuki arena politik, sehingga *desa adat* tidak bisa diperdaya untuk memproduksi kepentingan kelompok-kelompok dominan, melainkan mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Dalam kaitan proteksi *desa adat* terhadap berbagai dominasi yang diakibatkan oleh perkembangan pariwisata, maka tidak saja hanya cukup dengan membuat aturan atau *awig-awig*, tapi perlu dibarengi dengan berbagai pemahaman tentang berbagai kepentingan yang ada dan dibawa oleh pariwisata, termasuk ideologi dibalik dikembangkannya pariwisata tersebut. Hal ini menjadi fokus perhatian, karena ideologi merupakan benteng pertahanan terakhir dan merupakan bagian dari politik identitas. Di samping itu, pariwisata tidak perlu dipolitisasi, karena akan membawa kehancuran bagi masyarakat dan daerah tempat pariwisata tersebut dikembangkan. Sebagai contoh, Richter (1996:253) menyebutkan bahwa akibat pariwisata di Philippines dipolitisasi antara lain dengan *Martial Law*-nya, maka pariwisata di negara itu hancur, dan salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah terlalu mengintervensi dan mengkaitkan pariwisata dengan aktivitas politik di negara tersebut.

Salah satu solusi yang diajukan untuk mencegah penyalahgunaan (*to abuse*) pengaruh kekuasaan dalam pariwisata adalah dengan menerapkan strategi manajemen publik dalam aktivitas kepariwisataan. Hal ini diharapkan dapat mendorong

pembangunan pariwisata berkelanjutan yang melindungi masyarakat dan sumber daya nasional, baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Harapan ini sejalan dengan Elliott (1997:xii), bahwa pariwisata secara politik harus dapat melindungi alam dan masyarakat.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa (a) pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), yang berwujud dominasi sebagai pelaksanaan dari kekuasaan; (b) pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruhi oleh ruang dan waktu; (c) kajian politik pariwisata telah menampilkan *the three player* atau *the three actor* dengan komponennya yaitu negara (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pasar (*market*). Komponen yang paling baru dimasukkan sebagai pemain dan aktor politik pariwisata dan sekaligus merupakan pengaruh sosiologi adalah pasar (*market*); (d) kapitalisasi dan komodifikasi muncul sebagai akibat globalisasi pasar pariwisata atau sebagai buah dari internasionalisasi pariwisata; (e) penempatan pariwisata dalam ruang kapitalis sebagai konsekuensi dari politik pariwisata akan berbicara tentang “siapa memperoleh apa”, “dimana diperoleh”, dan “bagaimana memperoleh”; (f) dalam mempelajari politik pariwisata perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik, baik secara eksplisit maupun implisit.

Daftar Pustaka

Agger, Ben. Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya. Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005.

2
Britton, S.G. *Tourism and Underdevelopment in Fiji*. Canberra, Australian National University, 1991.

2
Craik, J. *Resorting to Tourism: Cultural Policies for Tourism Development in Australia*. North Sydney, Allen & Unwin, 1991.

8
Elliot, James. *Tourism Politics and Public Sector Management*. London, Routledge, 1997.

7
Hall, Colin Michael. *Tourism and Politics: Policy, Power and Place*. Chichester, Jhon Wiley, 1994.

PARIWISATA DALAM MASYARAKAT KAPITALIS: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	karyasosiologi.blogspot.com Internet Source	1%
2	desarrollo.diputados.gob.mx Internet Source	1%
3	adoc.tips Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	jurnalanakkampus.blogspot.com Internet Source	1%
6	mafiadoc.com Internet Source	<1%
7	citation.allacademic.com Internet Source	<1%
8	repositorio.ufpe.br Internet Source	<1%
9	docobook.com	

Internet Source

<1%

10

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

11

edoc.pub

Internet Source

<1%

12

mavia99.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4 words

Exclude bibliography On

PARIWISATA DALAM MASYARAKAT KAPITALIS: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
